

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan disuatu daerah atau wilayah. Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang tertera dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah merupakan perangkat pemerintah daerah untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan akan kepentingan pembangunan di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Diskominfo, perolehan pajak daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 memiliki kontribusi sebesar 60,4% yang merupakan pendapatan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Namun angka tersebut belum dapat mencapai target realisasi pajak, sehingga Gubernur Provinsi Jawa Barat – Ridwan Kamil dalam wawancara Kompas (2021) menuturkan bahwa perlu adanya optimalisasi potensi pajak guna mendukung program daerah sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sebagai instansi pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau disingkat BAPENDA mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah melalui pelayanan publik berupa pelayanan dan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan pada 34 kantor cabang BAPENDA yang disebut dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D), termasuk di Kota Sukabumi.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi memiliki tujuan untuk membangun *good governance* sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui dilakukannya pelayanan publik. Kharisma (2014) menjelaskan bahwa konsep *good governance* diartikan sebagai cara pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk pembangunan. Sedangkan Maryam (2016) mengemukakan bahwa *good governance* dapat terwujud apabila dilakukannya optimalisasi fasilitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Apriana dan Suryanto (2010), sebagai upaya untuk meningkatkan potensi pajak, diperlukannya peran aktif daerah untuk meningkatkan hasil pendapatan dan pengelolaan pajak daerah dengan dilakukannya pemerataan fasilitas layanan publik. Terlebih di era otonomi daerah seperti saat ini, daerah dituntut untuk lebih

kreatif dalam memenuhi fasilitas – fasilitas pelayanan publik yang dapat mendukung peningkatan pendapatan. Hal tersebut selaras dengan visi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu “Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dan akuntabel” dan misinya untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal dan berdaya saing. Ketercapaian *good governance* tidak hanya mengacu pada optimalisasi fasilitas pelayanan publik, namun juga kinerja aparatur negara sebagai pelaksana kegiatan publik juga mengambil peranan yang cukup penting (Suhendar, 2010). Azlina dan Amelia (2014) mengemukakan bahwa kinerja pemerintah mempengaruhi tingkat ketercapaian *good governance*, hal tersebut berkaitan dengan hasil kerja yang diserahkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum.

Namun, berdasarkan pada hasil studi kasus yang telah dilakukan pada Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi dan analisis studi banding pada Kantor P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat, P3D Wilayah Kabupaten Bogor, serta P3D Wilayah Kota Bandung III, ditemukannya permasalahan secara umum yaitu kepadatan pengunjung wajib pajak pada area pintu masuk dan ruang tunggu yang disebabkan oleh luasan bangunan yang kurang sehingga belum dapat diterapkan sepenuhnya kesesuaian dengan alur SOP pelayanan. Penumpukkan tersebut mengakibatkan estimasi waktu pelayanan yang melebihi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Disamping itu, ditemukan permasalahan lainnya yaitu ketidaksesuaian pengaturan organisasi ruang kantor dengan alur aktivitas kerja yang dilakukan dari masing – masing sub bagian. Permasalahan tersebut berakibat pada sulitnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar masing – masing staff sehingga sering terjadinya keterlambatan penyerahan dokumen. Dengan ditemukannya permasalahan tersebut, maka baik pelayanan maupun aktivitas kerja yang dilakukan belum optimal, sehingga *good governance* yang menjadi tujuan dari instansi belum dapat dicapai.

Dengan fungsi utama kantor sebagai kantor pelayanan publik serta pengelolaan pendapatan daerah, maka diperlukannya kesesuaian ruang yang digunakan untuk masing – masing aktivitas yang dilakukan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan serta kinerja sebagai upaya untuk membangun *good governance* dilingkungan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, maka diperlukannya revitalisasi gedung kantor. Revitalisasi tersebut tertera dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, mengenai

Standar Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Perancangan *new design* tersebut berlandaskan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu pemenuhan fasilitas publik berupa loket pelayanan wajib pajak dengan penyusunan yang disesuaikan dengan alur serta jenis pelayanan agar dapat tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan estimasi waktu yang ditentukan. Selain itu, dalam perancangan baru ruang interior tersebut diperlukannya penataan organisasi ruang kerja yang disesuaikan dengan alur aktivitas kerja sesuai dengan sub-bagiannya. Maka dari itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diterapkan pendekatan aktivitas agar dapat mengakomodasi dan menunjang tiap – tiap aktivitas yang dilakukan pada lingkungan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

1.2 Identifikasi Masalah

Perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi dengan permasalahan sebagai berikut :

- Permasalahan Umum
 - a. Kapasitas ruang tunggu pelayanan dapat menampung 200 orang pengunjung wajib pajak atau sekitar 200 m².
 - b. Hubungan antar ruang belum tertata dengan baik sehingga sirkulasi belum efektif sesuai dengan aktivitas kerja, seperti pada area kerja dan loket pelayanan.
- Permasalahan Fasilitas
 - a. Belum terdapatnya fasilitas penunjang pelayanan publik yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu diantaranya fasilitas loket untuk ibu hamil, lansia, dan diffable, pojok baca, *charging station*, dan fasilitas fotokopi dan print.
- Permasalahan Teknis
 - a. Pencahayaan alami pada area kantor tidak merata, sehingga terdapat beberapa ruangan yang terlalu terang dan area lainnya kekurangan pencahayaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimana perancangan interior kantor yang menyesuaikan dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, mengenai Denah Standar Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat?
- b. Bagaimana perancangan interior kantor yang berlandaskan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat?
- c. Bagaimana perancangan interior kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi yang baik dengan pendekatan aktivitas?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi ini adalah untuk merancang Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dapat membangun *good governance* melalui pemenuhan fasilitas layanan publik pengelolaan pendapatan daerah melalui pendekatan aktivitas.

1.4.2 Sasaran

Adapun sasaran dari perancangan ulang Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi ini adalah sebagai berikut.

- a. Penataan loket pelayanan publik yang sesuai dengan urutan pelayanan.
- b. Pemenuhan loket pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan wajib pajak dan non pajak.
- c. Area informasi dibuat frontal dengan pintu masuk.
- d. Pengorganisasian ruang kerja dibuat berdasarkan pada sub bagian masing masing bidang kerja serta jenis aktivitas yang saling berhubungan.
- e. Pemilihan bentuk furniture yang sesuai dengan aktivitas dan membuat pengguna lebih leluasa bergerak.
- f. Penataan furniture yang mendukung koordinasi dan komunikasi yang baik antar sesama pekerja.
- g. Mewujudkan lingkungan kerja yang menyesuaikan dan mengakomodasi aktivitas penggunanya.

1.5 Batasan Perancangan

Batasan perancangan pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi ini adalah sebagai berikut :

- a. Objek desain adalah Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi yang berlokasi di Jalan Masjid No. 22, Cikole, Gunung Parang, Kota Sukabumi, Jawa Barat yang terdiri dari 2 lantai pada bangunan kantor utama.
- b. Pengguna dari objek desain terdiri dari ASN dan TKK Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, staff Jasa Raharja, staff Kepolisian, staff Bank BJB, dan masyarakat publik.
- c. Ruang yang akan dirancang antara lain area pelayanan publik lantai 1 dan area kerja ASN pada lantai 2.
- d. Luasan total perancangan adalah 2300 m².

1.6 Manfaat Perancangan

a. Manfaat bagi Masyarakat/Komunitas

Perancangan yang telah dihasilkan dapat menjadi pertimbangan ataupun referensi untuk diterapkan pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi agar diharapkan kedepannya fasilitas sarana dan prasarananya dapat lebih baik lagi.

b. Manfaat Bagi Institusi Penyelenggara Pendidikan

Hasil dari perancangan ini dapat menjadi kajian serta referensi dalam penulisan Tugas Akhir mahasiswa Desain Interior selanjutnya yang diharapkan dapat dikembangkan lebih baik lagi.

c. Manfaat bagi Keilmuan Interior

Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur atau masukan dalam merancang sebuah kantor pemerintahan di Provinsi Jawa Barat terutama dalam bidang pendapatan daerah yang sesuai dengan aturan, kebutuhan, dan standar. Sehingga dapat menjadi temuan serta pengetahuan baru dalam bidang keilmuan desain interior.

1.7 Metode Perancangan

Metode perancangan yang menjadi tahapan untuk perancangan interior Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1.7.1 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk perancangan ulang Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi didapatkan melalui beberapa cara, diantaranya adalah dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi, studi lapangan, dan dokumentasi. Disamping itu pengumpulan data sekunder terkait dengan perancangan didapatkan dengan menggunakan studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal luar maupun dalam negeri, artikel online, thesis, peraturan – peraturan serta buku yang relevan dengan perancangan.

1.7.1.1 Pengumpulan Data Primer

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi secara langsung sehingga dapat diketahui situasi dan kondisi yang memiliki keterkaitan dengan proses perancangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait, seperti Kepala Cabang dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi serta dengan ASN dan TKK yang bertugas dilingkungan Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi untuk mengetahui kebutuhan dan persepsi pengguna terhadap ruangan. Data – data yang di dapatkan dari hasil wawancara ini digunakan sebagai objek analisis hal – hal yang berkaitan dengan perancangan. Berikut dibawah ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan.

- a. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Tujuan dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Peran penting Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- d. Aktivitas yang dilakukan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- e. Jenis pelayanan yang dilakukan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- f. Waktu operasional kantor dan pelayanan publik di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- g. Jumlah pegawai dan staff Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- h. Jumlah layanan publik yang dilayani oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

- i. Fasilitas, sarana, dan prasana Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- j. Jumlah total ruangan pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- k. *Flow activity* pegawai dan staff Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- l. Kebutuhan ruang pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- m. Kelebihan dan kekurangan pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

Observasi

Berdasarkan pemaparan Akhmadi (2017), observasi dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengamatan pada objek desain berupa kondisi sekitar eksisting dan aktivitas pengguna ruang yang terjadi di dalamnya sehingga di dapatkan informasi yang valid. Proses observasi dilakukan secara langsung pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi yang berlokasi di Jalan Masjid No. 22, Cikole, Gunung Parang, Kota Sukabumi, Jawa Barat untuk di analisis lebih lanjut sehingga menghasilkan data seperti orientasi bangunan, arah angin, kebisingan, aktivitas manusia, dan bangunan lainnya yang terdapat pada sekitar site yang kemudian memunculkan permasalahan – permasalahan desain sebagai pertimbangan dalam proses perancangan. Dengan data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- a. Aktivitas pengguna baik ASN dan layanan publik dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- b. Kondisi elemen – elemen pembentuk interior pada eksisting Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- c. Kondisi ruangan dan fasilitas layanan publik pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.
- d. Kondisi lingkungan sekitar pada area Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

Dokumentasi

Mengacu pada KBBI, dokumentasi memiliki arti sebagai suatu proses yang berfungsi untuk dapat menghimpun berbagai data dan informasi, dapat berupa tulisan, gambar, arsip, maupun kutipan yang berkaitan dengan perancangan untuk kemudian ditelaah

lebih jauh. Jenis dokumentasi dilakukan pada metode perancangan ini menggunakan media foto yang berfungsi untuk memberikan gambaran sehingga dapat membantu dalam proses analisis dan identifikasi masalah yang ditemukan pada objek perancangan. Dokumentasi tersebut di dapatkan pada saat melakukan proses observasi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi.

1.7.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Studi Literatur

Studi literatur merupakan proses dalam mencari informasi dan referensi berupa teori yang relevan dengan perancangan ulang Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi. Informasi dan referensi tersebut di dapatkan melalui jurnal, tesis, artikel, buku, situs internet yang memiliki sumber terpercaya dan aturan – aturan atau standar perancangan yang sudah ditetapkan. Studi literatur yang menjadi sumber acuan pada perancangan ini antara lain :

- a. Buku standar perancangan ruang interior seperti *Human Dimension and Human Space* oleh Julius Panero dan Martin Zelnik.
- b. Buku *Time Saver Standards for Building Types* oleh Joseph De Chiara dan John Callender.
- c. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2016.
- d. *Webside* resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. ANJAB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat P3DW Kota Sukabumi.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- g. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang standar pelayanan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2006
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011
- j. Laporan tugas akhir/tesis/skripsi dan jurnal terkait.

1.7.2 Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan serta temuan permasalahan pada objek perancangan kemudian dilakukan analisa. Analisa data – data tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.2.1 Analisa Kebutuhan Ruang

Analisa kebutuhan ruang dilakukan berdasarkan pada standar sarana dan prasarana yang tertera pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dilakukan pula analisa kebutuhan ruang berdasarkan pada jenis pekerjaan dan aktivitas yang terjadi pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi. Untuk menentukan kebutuhan ruang yang bersifat pribadi dan ruang yang digunakan bersama, ditentukan berdasarkan klasifikasi pengguna dan bidang kerja yang dilihat pada struktur organisasi.

1.7.2.2 Analisa Pengisi Ruang

Analisa pengisi ruang ditentukan berdasarkan pada standar fasilitas sarana dan prasarana yang tertera pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan ANJAB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat P3D Wilayah Kota Sukabumi yang selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2006. Selain itu, dilakukan pula analisa kebutuhan pengguna ruang berdasarkan pada jenis aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang diperlukan oleh pengguna.

1.7.2.3 Analisa Kondisi Ruang

Analisa kondisi ruang dilakukan pada bangunan eksisting untuk mengetahui kondisi pencahayaan alami, arah angin, tingkat dan sumber kebisingan pada interior Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

1.7.3 Tahap Sintesa

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisa selanjutnya digunakan sebagai dasar dari pemecahan masalah berupa perumusan konsep dan tema yang kemudian dikembangkan pada perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi.

1.7.4 Metode Pengembangan Desain

Pengembangan konsep tema kemudian diaplikasikan pada perancangan dengan hasil akhir sebagai berikut.

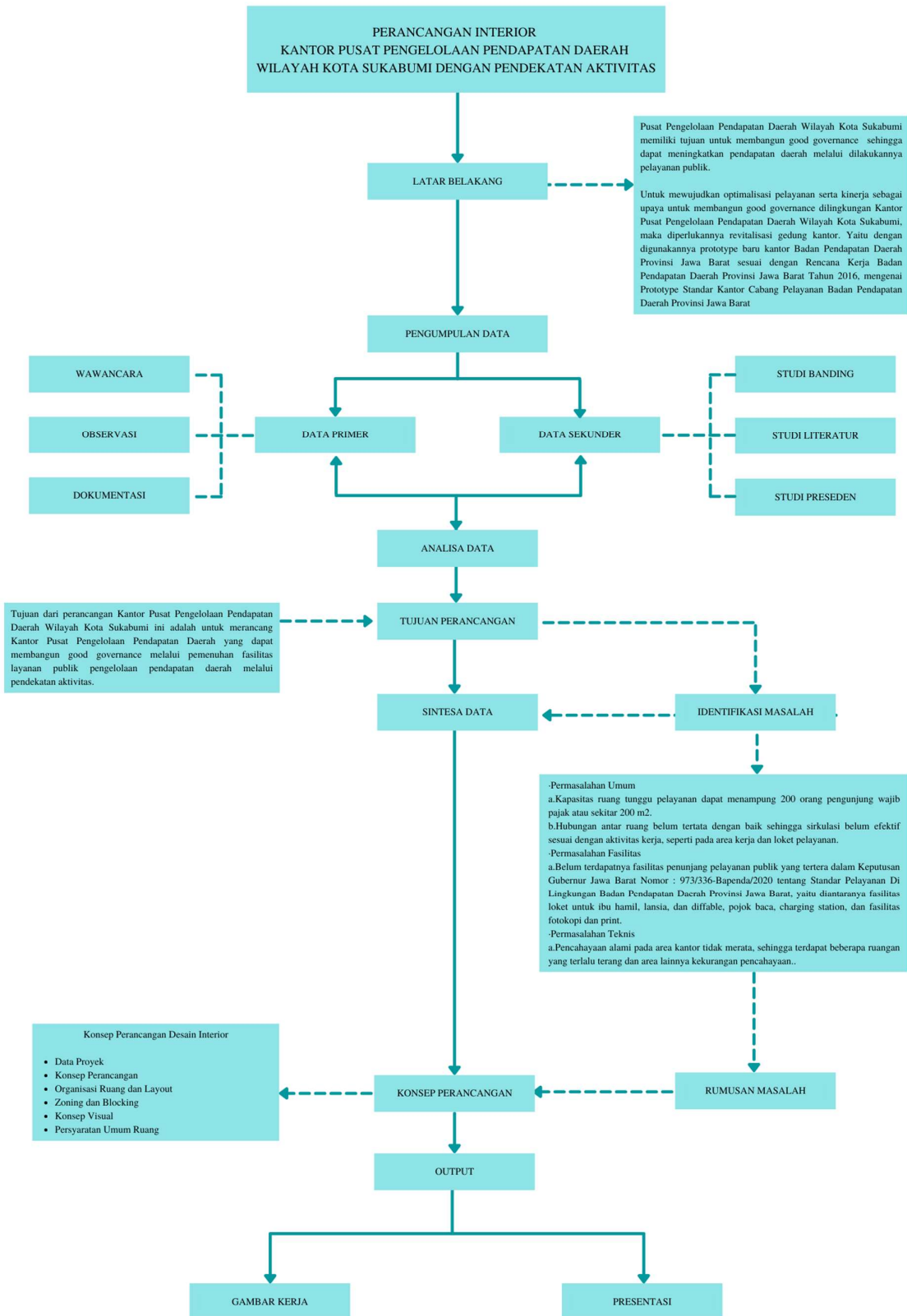
1.7.4.1 Gambar Kerja

Hasil akhir gambar kerja yang terdiri dari *layout plan, floor plan, ceiling plan, mechanical electrical plan, elevation*, potongan, detail interior, detail furniture, dan gambar perspektif interior.

1.7.4.2 Presentasi

Hasil dari perancangan kemudian dipresentasikan secara lisan yang dilengkapi materi presentasi menggunakan media berupa *power point* yang disertai gambar animasi.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir ini diantaranya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian - uraian yang melatar belakangi perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan masalah, manfaat perancangan, metode perancangan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan laporan pengantar karya tugas akhir.

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN STANDARISASI

Berisi uraian – uraian yang berkaitan dengan kajian literatur yang digunakan dalam perancangan. Seperti pengertian kantor secara umum hingga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi serta standarisasi ruang – ruang yang akan dirancang, kajian literatur mengenai pendekatan yang digunakan, analisa studi preseden bangunan dengan pendekatan sejenis, serta analisa data proyek.

BAB III : ANALISIS STUDI BANDING, DESKRIPSI PROYEK, DAN ANALISIS DATA

Berisi hasil analisis data yang berkaitan dengan organisasi ruang, penyusunan layout, penggunaan material, pemilihan warna, sistem pencahayaan, penghawaan, dan keamanan, serta penggunaan *treatment* akustik yang terdapat pada tiga objek studi banding yang dipilih.

BAB IV : TEMA, KONSEP PERANCANGAN, DAN APLIKASI PERANCANGAN

Berisi uraian – uraian mengenai pemilihan tema dan konsep perancangan serta pengaplikasiannya. Diantaranya terdiri dari konsep *zoning* dan *blocking*, konsep sirkulasi, konsep tata ruang kantor, persyaratan teknis ruang dan elemen interior.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penulisan laporan pengantar karya tugas akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN